

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
(studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Oleh :

BAGUS ARDI DESTYAWAN
E.11.17.134

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana



PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
(studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Oleh :

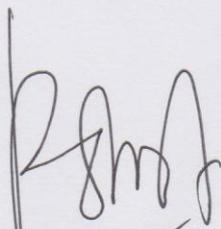
BAGUS ARDI DESTYAWAN
E.11.17.134

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Dan
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

.....

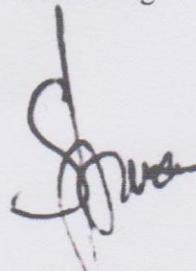
Gorontalo,

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN : 0914027902

Pembimbing II



Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN : 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

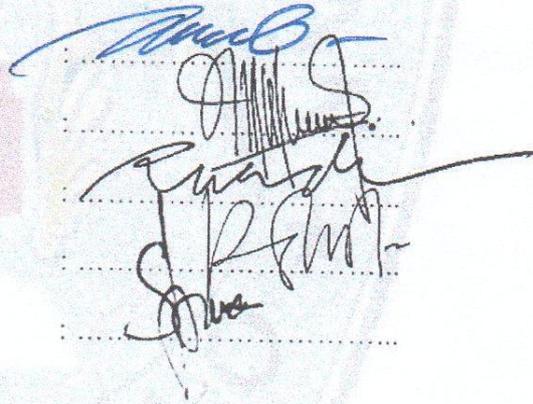
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah)

Oleh
BAGUS ADRI DESTYAWAN
E11.17.134

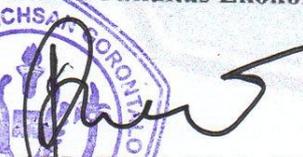
Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2021

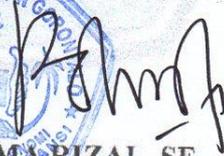
Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, SE., MM
2. Melinda Ibrahim, SE., MSA
3. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
4. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
5. Shella Budiawan, SE., M.Ak



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

DE ARIAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi

RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyetakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan



Bagus Ardi Destyawan
E.11.17.134

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya,,,(QS.Al-Baqarah:286).
- ❖ Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (QS.Al-Insyirah:7-8).
- ❖ Orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.

PERSEMBAHAN :

- Untuk kedua orangtuaku yang sangat aku cintai dan hormati yang selalu mendo'akan keberhasilanku sehingga aku bisa sampai ke titik ini.
- Untuk Saudaraku satu-satunya sangat ingin melihat kakaknya bias berhasil dan membanggakan orangtua serta keluarga bersarku,
- Untuk teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat dan membantu memberikan saran untuk keberhasilan skripsiku.
- Dan untuk dosen pembimbing serta dosen pengujiku yang tidak bisa aku sebut satu per satu yang telah sangat amat membantu dan membimbing aku selama aku mengerjakan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dan doa dari kedua orang tua, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhammad Gaffar, SE.,M.Ak, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. H. Gaffar.,M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Ariawan SE, S.Psi M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Rahma Rizal,SE.,Ak.,M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan selaku pembimbing I. Ibu Shella Budiawan SE.,M.Ak selaku pembimbing II serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan terutama oleh kedua pembimbing akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Gorontalo..... 2021

Penulis

ABSTRACT

BAGUS ARDI DESTYAWAN. E1117134. FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF BOLAANG MONGONDOW

This study aims to find out the financial performance of the government of Bolaang Mongondow Regency. The object of this research is the financial performance of the local government. This study uses quantitative methods through using ratio analysis. The population of this research is the realization of the Local Budget. The sample is the report on the Local Budget realization of the Bolaang Mongondow Regency from 2017 through 2019. The results of the study show that the independence ratio for three years on average is 6.11%, which means that the financial performance of the Bolaang Mongondow Regency Government in terms of the independence ratio has not been independent yet. The effectiveness ratio for three years on average shows 108.63%, which means that the financial performance of the Bolaang Mongondow Regency Government in terms of the effectiveness ratio has been effective. The activity ratio for three years on average shows that the financial performance of the Bolaang Mongondow Regency Government in terms of the activity ratio is categorized as good. The growth ratio for three years on average shows that the financial performance of the Bolaang Mongondow Regency Government in terms of growth ratio is good.

Keywords: financial performance, Local-Owned Source Revenue, Local Budget

ABSTRAK

BAGUS ARDI DESTYAWAN.E1117134. ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio. Populasi penelitian ini adalah Realisasi APBD. Kemudian sampelnya laporan realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Rasio Kemandirian selama tiga tahun rata-rata menunjukkan 6,11%, artinya bahwa kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari rasio kemandirian belum mandiri. Rasio Efektivitas selama tiga tahun rata-rata menunjukkan 108,63%, artinya bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari rasio efektivitas sudah efektif. Rasio Aktivitas selama tiga tahun rata-rata menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari rasio aktivitas dikategorikan sudah baik. Rasio Pertumbuhan selama tiga tahun rata-rata menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari rasio pertumbuhan baik.

Kata kunci: kinerja keuangan, PAD, APBD

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	
iiHALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
viABSTRACT	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.1.1 Pengertian Anggaran.....	11
2.1.2 Fungsi Anggaran.....	12
2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan	13
2.1.4 Kinerja Pemerintah Daerah.....	14
2.1.5 Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
2.1.6 Pengertian Analisis Kinerja Keuangan	15
2.1.7 Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	15
2.1.8 Analisis Rasio Keuangan.....	16
2.1.9 Manfaat Analisis Rasio Keuangan.....	17

2.1.10 Elemen Laporan Realisasi Anggaran	17
2.1.11 Analisis Rasio Keuangan APBD	23
2.1.12 Tolok Ukur Kinerja Keuangan	26
2.1.13 Penelitian Terdahulu	27
2.2 Kerangka Pemikiran	29
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Objek Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian	31
3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	31
3.2.2 Operasional Variabel.....	32
3.2.3 Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4 Metode Analisis Data.....	34
3.2.5 Stándar Rasio Keuangan Daerah	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Sejahtera Singkat Lokasi Penelitian.....	38
4.1.2 Letak Geografis Lokasi Penelitian.....	39
4.1.3 Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	40
4.1.4 Profil Badan Keuangan Daerah	41
4.2 Analisis Hasil Penelitian	43
4.2.1 Analisis Rasio Kemandirian	44
4.2.2 Analisis Rasio Efektivitas	45
4.2.3 Analisis Rasio Aktivitas	47
4.2.4 Analisis Rasio Pertumbuhan.....	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
4.3.1 Pembahasan Rasio Kemandirian	49
4.3.2 Pembahasan Rasio Efektivitas	51
4.3.3 Pembahasan Rasio Aktivitas	53
4.3.4 Pembahasan Rasio Pertumbuhan	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran-saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi APBD	7
Tabel 3.1 Operasional Variabel	33
Tabel 4.1 Rasio Kemandirian	45
Tabel 4.2 Rasio Efektifitas	46
Tabel 4.3 Rasio Aktivitas	47
Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Laporan Keuangan Tahun 2017-2018	51
Lampiran 2. Laporan Keuangan Tahun 2018-2019	52
Lampiran 3. Surat Keterangan penelitian	53
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian.....	54
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	55
Lampiran 6. Hasil Turnitin.....	56
Lampiran 7. Curriculum Vitae.....	57
Lampiran 8. Abstract.....	58
Lampiran 9. Abstrak.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dinamika Perkembangan dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana

yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut telah member angin segar kepada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom. Hal tersebut disebabkan yang lebih mengerti persoalan daerah adalah daerah itu sendiri, Darise (2009:2).

Penyelenggaraan otonomi daerah di samping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan obyektif dalam penyelenggaraan Pemerintah saat ini. Pola penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik di masa lalu sudah tidak sesuai lagi karena di samping tidak efisien, biayanya juga tidaks sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena factor internal maupun eksternal. Dari faktor eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya. Dari faktor internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan (Darise, 2009:2).

Peran Pemerintah Pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis sudah harus diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan *Good Governance*, maka adalah tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi daalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam konteks birokrasi pemerintah, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan (Darise, 2009:18).

Upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi DPRD adalah merupakan hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini. Saat ini, daerah sudah diberi kewenangan bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemeintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan,

peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Darise, 2009:3).

Dalam menghadapi otonomi daerah, perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian. Dalam mengukur suatu kinerja dapat diketahui juga indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja dan adanya indikator kinerja akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran serta mengeluarkan kinerja anggaran pemerintah. Transparansi sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lembaga pemerintah yang membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan anggaran. Sedangkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah harus didukung oleh sistem ekonomi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (*standardship* dan *accountability*).

Dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, diharapkan dapat lebih mendukung pemberdayaan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang bersifat umum dan pembangunan di daerah.

Pemerintahan butuh suatu pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas, oleh karena itu diperlukan laporan-laporan untuk setiap tindakan tetapi tidak cukup dengan laporan lisan saja. Tetapi perlu didukung dan dilengkapi dengan laporan keuangan secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu

pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan informasi-informasi memadai yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas yang berimbas pada membudayanya korupsi sistemik. Maka untuk mengikis korupsi, salah satu caranya adalah membudayakan membuat laporan keuangan secara baik dan benar.

Selebar laporan keuangan yang dipublikasikan melalui media masa baik cetak maupun elektronik pada dasarnya mengandung informasi yang sangat berarti jika dianalisis secara seksama. Oleh karena itu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi tergolong sehat atau sakit dapat dilihat dari laporannya.

Salah satu alat yang digunakan untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, efisien dan fleksibel. Analisis rasio terhadap APBD perlu

dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta, Halim (2007:127).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang telah ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Halim (2007:128).

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Halim (2007:128) :

Rasio Aktivitas Keuangan Daerah, rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Halim (2007:128) :

Penilaian kinerja keuangan terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah sebagai ukuran kinerja keuangan dapat digunakan beberapa rasio, yakni ; rasio kemandirian daerah, rasio aktivitas, rasio efisiensi serta rasio pertumbuhan. Adapun data yang digunakan untuk menganalisis rasio-rasio dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah		Transfer Pemerintah (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2016	46.408.712.500,-	47.338.649.103,-	875.041.614.848,-
2017	69.884.540.030,-	68.669.558.555,-	970.453.037.658,-
2018	43.451.374.144,-	43.651.374.144,-	957.799.350.570,-
2019	52.326.417.054,-	64.108.478.949,-	957.571.533.828,-

Sumber : BKDKabupaten Bolaang Mongondow.

Dari tersebut menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2016 sampai dengan 2019 peningkatan sementara bantuan pemerintah dalam bentuk dana perimbangan juga mengalami meningkat.

Laporan realisasi anggaran tersebut diatas belum cukup menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilakukan agar diketahui apakah pelaksanaan anggaran tersebut efektif, efisien serta bagaimana pertumbuhan atau peningkatan realisasi anggaran dengan menggunakan pengukuran rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di mana pemerintah dibentuk karena mempunyai akuntabilitas terhadap masyarakat, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah namun yang terjadi saat ini Otonomi Daerah belum mampu mewujudkannya malah masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran yang bertebaran di daerah Bolaang Mongondow. Jika demikian kondisinya maka timbul permasalahan yang perlu diteliti dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari Rasio Kemandirian.
2. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari Rasio Efektifitas dan Efisiensi.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari Rasio Aktivitas.
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari Rasio Pertumbuhan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis data berupa Laporan realisasi anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow, Guna menganalisis kinerja keuangan dengan pendekatan rasio Kemandirian, rasio Efektifitas dan Efisiensi, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari Rasio Kemandirian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari Rasio Efektifitas dan Efisiensi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari Rasio Aktivitas.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari Rasio Pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan dari berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Praktis, Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Bagi Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan maupun wawasan tentang bagaimana ruang lingkup dari pemerintahan khususnya mengenai penilaian kinerja keuangan daerah yang diteliti serta untuk membandingkan teori yang di dapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penilaian kinerja keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Menurut Mardiasmo (2005:61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Bahtiar dkk (2002:24) Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang di usulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang di usulkan untuk membayai belanja tersebut. Anggaran juga dapat di defenisikan sebagai proses alokasi sumber daya yang penting. Mulyadi (2004:488) Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Sedangkan Gunawan (2002 : 6) mengemukakan bahwa anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinas dan pengawasan.

Definisi Anggaran, atau bisa disebut dengan pembiayaan public diatas, dapat digunakan baik dalam lingkup rumah tangga maupun daerah/Negara. Anggaran dibagi menjadi dua, yaitu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). APBN dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas persetujuan DPR, sedangkan APBD dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD

Mengingat sifat pemerintahan yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas (Nordawan, dkk, 2006 : 47). Dari beberapa devinisi tentang anggaran dapat kitasimpulkan bahwa anggaran adalah belanja yang ditentukan untuk melaksanakan rencana kegiatan pemerintahan untuk keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan dalam satu periode.

2.1.2 Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

- 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik,
- 2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan,
- 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum,
- 4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah,
- 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Hidayat, dkk (dalam Zakiah 2008 : 8) Kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan. Menurut Kane dan Johnson (dalam Bambang, 2006 :273) Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, outcome hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan otonomi masyarakat (Kane dan Johnson dalam Bambang, 2006 : 273). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008:503) sesuatu yang ingin di capai dengan memperlihatkan prestasi dan kemampuan kerja.

Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah, khususnya dibidang keuangan dapat digunakan analisis kinerja keuangan. Untuk melihat kinerja daerah dalam kaitannya dengan anggaran berbasis kinerja dapat dilakukan dengan “Analisis Belanja Daerah”. Menurut Mahmudi (2016:141) analisis ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah Pemerintah Daerah telah menggunakan APBD Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow secara ekonomis, efisien dan efektif. Menurut Collires yang diikuti Gaffar(2004:15) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan suatu perbandingan dari berbagai ukuran atau standar. Sedangkan Mulyadi (2004:51) mengemukakan bahwa kinerja merupakan penentuan efektifitas operasional pada suatu waktu

tertentu dalam organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebenarnya.

2.1.4 Kinerja Pemerintah Daerah

Istilah kinerja diterjemahkan dari kata performance yang berarti kerja, pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja hasil kerja atau untuk kerja. Menurut Sedarmayanti (2002:20) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dan suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undang selama satu periode anggaran, bentuk dan pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.1.5 Laporan kinerja keuangan Pemerintah

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah laporan perubahan ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.6 Pengertian Analisis Kinerja Keuangan

Analisis Berasal dari kata analisa, dalam kamus besar bahasa indonesia, yang dikutip oleh Sri Dewi (2007 : 6), adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya. Sedangkan kinerja adalah gambaran tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi analisa perkembangan kinerja keuangan adalah menyelidiki tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu menganalisa data keuangannya.

2.1.7 Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Sancoko, dkk (2008 : 22) Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan dengan mudah diketahui program-program yang di prioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alikasi anggaran pada masing-masing program.
- 2) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dengan Anggaran yang jelas, dan juga output serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran

dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi. Karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah.

2.1.8 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2010: 104), Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Sedangkan menurut Harahap (2004:121) mengatakan bahwa rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos dengan pos yang lain yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Analisis rasio merupakan salah satu yang sering digunakan para analisis dengan melihat rasio-rasio keuangan dengan membandingkan pada kurun waktu yang diteliti.

Lebih lanjut menurut Sartono (2008: 119) analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa datang. Dari beberapa opini di atas tentang rasio keuangan di atas dapat dilihat bahwa analisis rasio keuangan merupakan peralatan yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan dengan melihat kondisi kinerja keuangan saat ini dan dapat pula

mendeskripsikannya untuk masa yang akan datang dengan melihat hubungan antara unsur satu dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.

2.1.9 Manfaat analisis rasio keuangan

Menurut Munawir (2007: 101) manfaat yang sebenarnya dari setiap rasio tertentu adalah sangat ditentukan dari tujuan spesifik dari analisis, rasio-rasio bukan merupakan kriteria yang mutlak, rasio bermakna terutama untuk menunjukkan operasi dalam kondisi keuangan atas prestasi operasi saat ini dengan rasio masa lalu dan membantu menggambarkan trend dan pola perubahan dalam keadaan meningkat ataupun mengalami kemunduran.

2.1.10 Elemen laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi Anggaran terdiri atas empat elemen (pos) utama, yaitu:

A. Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Provinsi yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatandapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu, pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.

Berdasarkan UU no. 32 tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu :

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pendapatan pajak

Pendapatan pajak adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah atau pajak. Jenis pajak terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, Halim (2015: 64).

2. Pendapatan retribusi

Pendapatan retribusi adalah pendapatan yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi air, retribusi pertokoan, retribusi kelebihan muatan dan sebagainya.

3. Bagian laba usaha

Bagian laba usaha adalah pendapatan yang berasal dari hasil perusahaan milik dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, pendapatan ini berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan penerimaan jasa giro, selisih

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, Halim (2007:64)

C. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (Halim,2007 : 65). Dan dana perimbangan terdiri atas :

1. Dana bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan, bea hak atas tanah dan bangunan dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam manusia yaitu pemberian hak atas tanah negara.
2. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan negara yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara provinsi untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu provinsi dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas fiskal provinsi) dari alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Porsi DAU antara provinsi dan provinsi kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangen kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota.

D. Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu (Halim, 2007:65), Besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.

E. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

Lain –lain pendapat terdiri dari atas pendapatan hibah (bantuan yang tidak menguat dan pendapatan dana darurat).Pendapatan hibah, Pendapatan darurat, Pendapatan lainnya.

a. Belanja

Belanja daerah dapat didefenisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan berkurangnya kas direkening umum kas daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran

pemerintah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja provinsi maupun pengeluaran pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti pengeluaran kas. Perbedaannya adalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRD. Pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1) Belanja Operasi terdiri dari :

Belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi, Jaringan, Belanja aset tetap lainnya, Belanja aset lainnya.

3) Belanja tak terduga

Bantuan bencana alam, Bantuan bencana sosial, Bantuan korban politik.

b. Transfer

Transfer adalah penerimaan /pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer terdiri dari; dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

c. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dikategorikan menjadi 2 yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan pembiayaan yaitu :

- (1) Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu
- (2) Penerimaan pinjaman dan obligasi
- (3) Hasil penjualan asset provinsi yang dipisahkan
- (4) Transfer dari dana cadangan

2) Pengeluaran Pembiayaan yaitu :

- (1) Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo
- (2) Penyertaan modal
- (3) Transfer ke dana cadangan
- (4) Sisa lebih anggaran tahun sekarang

2.1.11 Analisis rasio keuangan berdasarkan anggaran pendapatan belanja

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2007: 128) yaitu :

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

b. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah

perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

$$1) \quad \text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

$$2) \quad \text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$1) \text{ Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$2) \text{ Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD}$$

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{Xt} - 1}{\text{RpXn} - 1} \times 100\%$$

Rp Xn-Xt-1 = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

Rp Xn-1 = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

2.1.12 Tolak ukur kinerja keuangan Pemerintah

Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat provinsi. Satuan ukur merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh unit kinerja mampu melaksanakan tupoksinya. Tolak ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing provinsi (Halim dan Theresia 2007: 172)

Menurut Warsono (2002:28-29) Untuk menemukan apakah suatu perusahaan sehat atau tidak dari sisi keuangan dapat dilakukan dengan dua macam metode, yaitu:

1. Metode Lintas Waktu

Metode ini merupakan metode tolak ukur analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio keuangan perusahaan dari satu periode tertentu dengan periode sebelumnya.

2. Metode Lintas Seksi/ industry(cross section)

Metode ini merupakan metode tolak ukur yang digunakan menentukan sehat tidaknya posisi keuangan perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dengan rasio keuangan rata-rata industrinya yang bersangkutan.

2.1.13 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang menjadi rujukan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

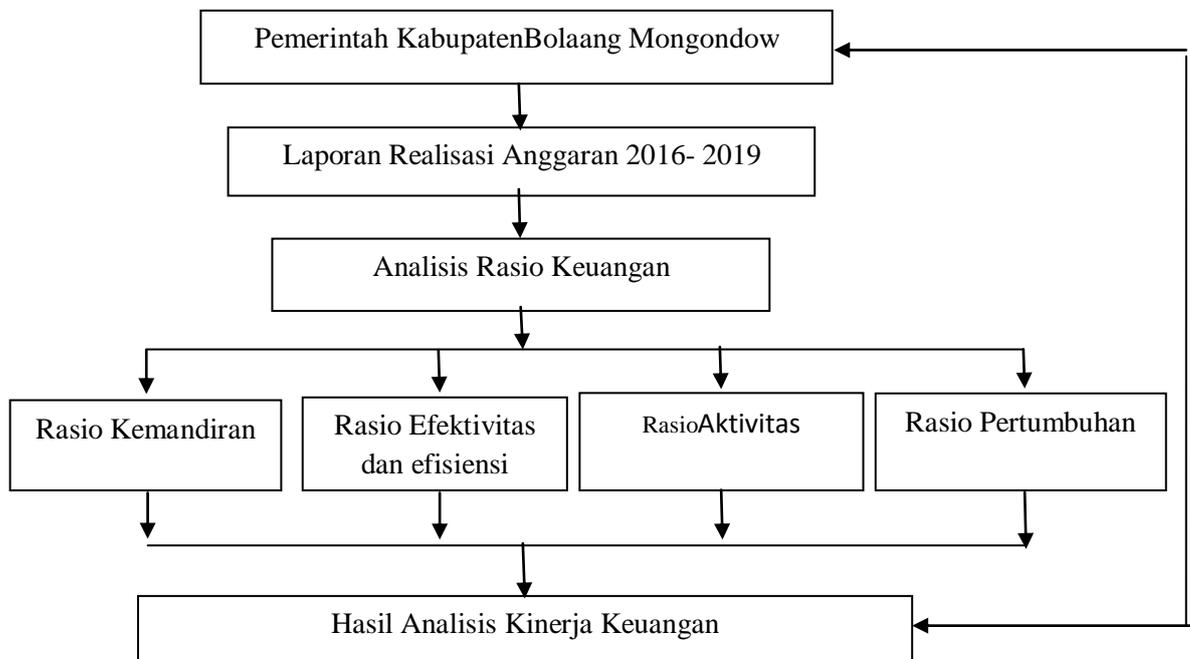
Nama dan tahun	Judul	Hasil
Mutiha, 2016	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor	rasio tingkat kemandirian memiliki hubungan yang konsultatif, disisi Bogorsangat efektif dalam merealisasikan pendapatan aslidaerahnya yang positif. Namun pemerintah anggaran adalah belanja tidak langsung langsung
Muhammad Zuhri, 2016	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur	Rasio Kemandirian Keuangan Rasio Efektivitas efektivitas PAD Kabupaten Kaur berjalan dengannilai rasio antara 75% -89%, Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Ope

		tergolong baik. sedangkan Rasio Belanja tidak baik karena memiliki rasio ukuran rata-rata tahun sebesar 23,2% pertahun Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur meng tahunketahun.
Hony Adhiantoko, 2016	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas keuangan Kabupaten Blora sudah efektif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat di Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang daerah.
Sandy Candra, 2018	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jember tahun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : variasi kategori baik, rasio derajat desentralisasi kategori sangat kurang, rasio kemandirian kategori rendah sekali, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang variatif, belanja termasuk dalam kategori belanja menunjukkan realisasi belanja operasional, rasio efisiensi belanja term

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu organisasi sektor publik yang berfungsi memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang maksimal, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu didukung oleh Kinerja Keuangan yang baik, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan tercapai, serta pengalokasian belanja secara tepat untuk kepentingan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2017-2019, dilakukan analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas masalah dan kajian pustaka, maka penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan Pemerintah Lokasi penelitian Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. di lihat dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 sampai tahun 2019.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode penelitian yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang akan menggambarkan bagaimana perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Metode keilmuan ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional adalah penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga dapat diterima dan dijangkau oleh penalaran manusia. Kerangka berpikir kohern dan logis dan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode-metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus.

3.2.2 Operasional Variabel

Variabel merupakan indikator penting yang menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena variabel merupakan sasaran dari obyek penelitian yang perlu didefinisikan secara operasional. Oleh sebab itu, dalam menentukan data apa yang diperlukan dalam penelitian ini terlebih dahulu dioperasionalkan variabel-variabel yang telah diinventarisir dalam kerangka berpikir dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator variabel yang bersangkutan. Berdasarkan variabel penelitian ini maka penulis akan menjelaskan variabel-variabel, yakni :

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli provinsi dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain.

2) Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas merupakan perbandingan antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

3) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan realisasi penerimaan asli daerah.

4) Rasio Aktivitas

Rasio belanja rutin terhadap APBD Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan perbandingan antara total belanja rutin dengan total APBD Bolaang Mongondow.

Rasio belanja pembangunan terhadap APBD Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan perbandingan antara total belanja pembangunan dengan total APBD Bolaang Mongondow.

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disajikan Operasional Variabel pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Rumus	Skala
Rasio Keuangan Pemerintahan Provinsi	Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat+Provinsi+Pinjaman}}$	Rasio
	Rasio Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Rasio
	Rasio Aktivitas	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBDP}} \quad \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBDP}}$	Rasio
	Rasio Pertumbuhan	$\frac{\text{Realisasi PAD Thn II} - \text{Realisasi PAD Thn I}}{\text{Realisasi PAD}}$	Rasio

Sumber : Halim (2015:128)

3.2.3 Sumber Dan Tehnik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari pokok-pokok permasalahan, mengumpulkan data dengan cara penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh adalah data sekunder system time series yakni dengan cara membandingkan laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, tahun 2017 sampai tahun 2019.

3.2.4 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dipergunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

2. Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktifitas (RA) terdiri dari dua rasio, yaitu :

- a. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Bolaang Mongondow:

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Bolaang Mongondow:

$$\frac{\text{Total Belanja Pemb.}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan (RP)

$$\text{Ratio Pertumbuhan} = \frac{\text{RPPAD } X_n - X_{n-1}}{\text{RPPAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan : $\text{RPPAD } X_n - X_{n-1}$ = Realisasi penerimaan pendapatan asli tahun yang dihitung dikurangi tahun sebelumnya.

$\text{RPPAD } X_{n-1}$ = Realisasi penerimaan pendapatan asli Kabupaten tahun sebelumnya.

3.2.5 Standar Rasio Keuangan Daerah.

1. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang

75% - 100%	Tinggi
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996	

2. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektifi
Kurang 60%	Tidak Efektif
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996	

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	KurangEfisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien i
Kurang 60%	Sangat Efisien
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996	

1. Rasio Aktivitas (RA)

1) Rasio Belanja Rutin (RBR)

Jika $RBR_t > RBR_{t-1}$, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

2) Rasio Belanja Pembangunan (RBP)

Jika $RBP_t > RBP_{t-1}$, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

2. Rasio Pertumbuhan(RP)

Jika $RP_t > RP_{t-1}$, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bolaang Mongondow menjadi bagian wilayah Propinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar. Kemudian tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I. Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret 1954, sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954. Atas dasar itulah, setiap tanggal 23 Maret seluruh rakyat Bolaang Mongondow selalu merayakannya sebagai HUT Kabupaten Bolaang Mongondow.

Seiring dengan Nuansa Reformasi dan Otonomi Daerah, telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2007 dan Kota Kotamobagu melalui Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan utama pembentukan Kabupaten Bolmong Utara dan Kota Kotamobagu adalah untuk memajukan daerah, membangun

kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabuan.

Semangat untuk memperoleh kesetaraan pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik telah membawa Kabupaten Bolaang Mongondow mekar menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yang menyebabkan berpindahnya ibukota pemerintahan dari Kecamatan kotamobagu ke Ibukota yang baru yaitu di kecamatan Lolak. Ini ditandai dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow

Bolaang Mongondow merupakan kabupaten yang terletak di ujung selatan Provinsi Sulawesi Utara. Terletak antara $0^{\circ}30'$ – $1^{\circ}0'$ Lintang Utara dan 123° – 124° Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya meliputi: sebelah utara dengan Laut Sulawesi, sebelah timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan, sebelah selatan dengan Teluk Tomini, dan di sebelah barat dengan Provinsi Gorontalo.

Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah terbesar di Provinsi Sulawesi Utara yakni $8,358,04 \text{ km}^2$. Terdapat 17 gunung dengan gunung tertinggi yakni Batu Bulawan. Juga terdapat 18 sungai dengan Sungai Dumoga merupakan sungai terpanjang yang mengalir sepanjang 87 km. Selain sungai, terdapat 8 buah

danau, terluas adalah Danau Moat yang luasnya mencapai 617 Ha. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki ketinggian yang bervariasi dari dataran, perbukitan hingga bergunung-gunung.

4.1.3 Visi , Misi dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

a. Visi

Berdasarkan gambaran umum dan permasalahan pokok yang dihadapi Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 adalah "Menuju Bolaang Mongondow HEBAT (Perubahan)"

Dalam mewujudkan visi pembangunan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017-2022 tersebut dirumuskan melalui Misi pembangunan.

b. Misi

Berdasarkan Visi Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 yaitu "Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel".

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 3 tujuan Pembangunan dan 3 sasaran selama 5 tahun kedepan sebagai berikut :

c. Tujuan Pembangunan

1. Mewujudkan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan yang baik, bersih serta pelayanan public yang professional.

2. Mewujudkan sektor pendapatan yang berkelanjutan dan optimal bagi penerimaan daerah
3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan teknis terhadap Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah guna mencapai kondisi yang optimal.

d. Sasaran Pembangunan

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah
3. Meningkatkan kualitas barang milik daerah

4.1.4 Profil Badan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2017 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

1) Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah guna merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

2) Sekretaris

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan, pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan yang membawahi dua sub bagian yaitu

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub bagian program, keuang dan pelaporan

3) Bidang Perimbangan, Pendapatan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah, retribusi daerah dan melaksanakan pendataan objek pajak dan subjek pajak serta melakukan koordinasi perimbangan daerah dengan pusat dan bagi hasil pajak dan non pajak, yang membawahi tiga seksi :

- a. Seksi Pendaftaran dan Penilaian
- b. Seksi pengelolaan data dan informasi
- c. Seksi perimbangan daerah dan pusat

4) Bidang Penagihan dan Keberatan

Mempunyai tugas mempersiapkan surat setoran pajak daerah dan melakukan perhitungan penetapan pajak/retribusi daerah untuk melakukan penagihan, perencanaan kegiatan-kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan/proyek dari berbagai instansi yang membawahi dua seksi :

- a. Seksi penagihan dan pemeriksaan
- b. Seksi keberatan dan pengurangan

5) Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perbendaharaan, pemeriksaan terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan, penerimaan, pengeluaran serta pemberian dan menyelesaikan masalah perbendaharaan dan verifikasi. Yang membawahi dua seksi :

- a. Seksi bendahara umum daerah
- b. Seksi belanja daerah

6) Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan transaksi yang menjadi beban APBD berdasarkan kebijakan sistem akuntansi yang membawahi dua seksi :

- a. Seksi pembukuan
- b. Seksi evaluasi dan pelaporan

7) Bidang Anggaran

Mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam tata kelola administrasi keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, yang membawahi dua seksi :

- a. Seksi anggaran pendapatan
- b. Seksi anggaran belanja

8) Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindaan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian yang membawahi dua seksi :

- a. Seksi perencanaan, penetapan dan penghapusan
- b. Seksi pendayagunaan dan pemindaan

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang terukur perihal Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimulai dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan penelitian terhadap suatu objek tertentu, dimana dari data selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam melakukan penelitian ini, data yang peneliti dapatkan adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, serta data Laporan Realisasi APBD (LRA) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan data tersebut, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

4.2.1 Analisis Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penerapan otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, yaitu dengan cara membandingkan total Penerimaan Asli Daerah (PAD)

dengan total penerimaan berupa Transfer dana pusat, provinsi dan pinjaman lainnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 4.1.
Rasio Kemandirian Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah dan Pinjaman	Rasio Kemandirian	Kriteria kemampuan
2017	68.669.558.555	970.453.037.658	7,08%	Rendah Sekali
2018	43.651.374.144	957.799.350.570	4,56%	Rendah Sekali
2019	64.108.478.949	957.571.533.628	6,69%	Rendah Sekali
Rata-rata Rasio Kemandirian			6,11 %	Rendah Sekali

Sumber : Data diolah 2021

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan tergolong masih sangat rendah. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan tabel diatas rata-rata sebesar 6,11%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih rendah sekali disebabkan oleh peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada peranan kemandirian daerah. penyebabnya tak lain ialah karena besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas transfer dari pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman lainnya dalam APBD secara

keseluruhan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2017 hingga 2019.

4.2.2 Analisis Rasio Efektifitas.

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam pencapaian kinerja dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.2.
Tingkat Efektifitas PAD Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Rasio Efektifitas
2017	68.669.558.555	69.884.540.030	98,26%	Efektif
2018	43.651.374.144	41.528.276.611	105,11%	Sangat Efektif
2019	64.108.478.949	52.326.417.054	122,52%	Sangat Efektif
Rata-rata Rasio Efektifitas			108,63%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow, mengalami peningkatan setiap tahunnya dan jika dirata-ratakan sebesar 109,63% yang artinya tingkat efektifitas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih tergolong sangat efektif karena tingkat efektivitas anggaran melebihi 100%. Hal ini

mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mampu menjalankan tugas pemerintahannya secara efektif dalam upaya merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD.

4.2.3 Analisis Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

- a. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Bolaang Mongondow:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 4.3.
Belanja Rutin Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Belanja Rutin	Total APBD	Rasio Belanja R.	Kriteria Rasio Belanja R
2017	600.025.766.967	1.039.637.390.873	57,71%	
2018	616.104.263.944	1.028.718.824.637	59,89%	Baik
2019	608.531.439.640	1.068.330.775.577	56,96%	Tidak baik
Rata-rata Rasio Belanja Rutin			58,18%	

Sumber : Data diolah 2021

- b. Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

$$\text{Rasio Belanja Pemb. terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pemb.}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 4.4.
Belanja Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Belanja Pembangunan	Total APBD	Rasio Belanja P.	Kriteria Rasio Belanja P
2017	217.643.499.309	1.039.637.390.873	20,93%	
2018	187.256.653.075	1.028.718.824.637	18,20%	Tidak baik
2019	210.755.250.695	1.068.330.775.577	19,73%	Baik
Rata-rata Rasio Pembangunan			19,62%	

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Rasio Aktifitas Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Belanja rutin rata-rata sebesar 58,19% dan untuk Belanja Modal rata-rata sebesar 19,62%. Hal ini menunjukkan porsi anggaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow diprioritaskan untuk Belanja Rutin yang artinya presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

4.2.4 Analisis Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan dengan cara

membandingkan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RPPAD}X_n - X_{n-1}}{\text{RPPAD}X_{n-1}} \times 100\%$$

Tabel 4.5
Tingkat Pertumbuhan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	RPPAD $X_n - X_{n-1}$	RPPAD X_{n-1}	Rasio Pertumbuhan	Kriteria Rasio Pertumbuhan
2017	21.330.909.453	47.338.649.102	45,06%	-
2018	(25.018.184.411)	68.669.558.555	-36,43%	Tidak Baik
2019	20.457.104.805	43.651.374.144	46,86%	Baik
Rata-rata Rasio Pertumbuhan			18,50%	

Sumber : Data diolah 2021

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tergolong mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 6,11%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikatakan masih rendah sekali, artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dinilai masih tinggi.

Berdasarkan perhitungan mengenai rasio kemandirian Kabupaten Bolaang Mongondow, diketahui bahwa tahun anggaran 2017 memiliki tingkat kemandirian tertinggi dengan nilai rasio sebesar 7,08%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2017 memiliki kemandirian daerah yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat daripada tahun anggaran lainnya. Sedangkan tingkat kemandirian yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2018 dengan tingkat rasio sebesar 4,56% dan pada tahun 2019 nilai rasio sebesar 6,99%. Jika dilihat secara keseluruhan tingkat rasio Kemandirian daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami fluktuatif.

Tingkat kemandirian Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2018 menurun sebesar 2,25% dari pada tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan PAD. Penurunan tajam PAD tersebut berasal dari pos Retribusi Daerah yang realisasinya hanya sebesar 57,71% dari target, namun untuk Lain-Lain PAD yang sah mengalami peningkatan lebih dari 100% dari pada

tahun sebelumnya. Namun, meskipun peningkatan Lain-Lain PAD yang sah mencapai lebih dari 100%, tingkat kemandirian Kabupaten Bolaang Mongondow tetap tergolong rendah sekali, karena tingkat kemandirian masih berada di bawah 25%. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow harus berusaha meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan perolehan PAD Kabupaten Bolaang Mongondow terutama dari sektor retribusi daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam kaitan dengan usaha peningkatan PAD, maka kebijakan yang dapat ditempuh ialah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD, sehingga diharapkan PAD dapat lebih berperan, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kebijakan dan usaha intensifikasi PAD ialah usaha berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber PAD yang telah ada atau telah berjalan selama ini. Sedangkan usaha ekstensifikasi PAD ialah berupa mencari dan menggali sumber-sumber PAD baru dalam batas peraturan perundang-undangan.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, Halim (2010: 128). Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri, Munir (2004:105). Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-

sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Zuhri, 2016, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur tergolong rendah sekali. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Blora masih tergolong rendah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sandy Candra, 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembranatahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jembranatahun masih tergolong rendah

4.3.2 Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Temuan penelitian mengenai tingkat efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondowberkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 108,63%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondowdapat dikatakan sangat efektif dalam melakukan

pemungutan PAD karena berada pada nilai minimum rasio efektifitas yaitu diatas 100%. Berdasarkan rasio efektifitas selama 2017-2019, tahun anggaran 2019 memiliki tingkat efektifitas anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 122,52%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2019 memiliki tingkat efektifitas yang lebih baik dalam rangka merealisasikan Penerimaan PAD yang telah ditetapkan sebelumnya daripada tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan tingkat efektifitas yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2017 dengan tingkat rasio sebesar 98,26%. Hasil dari analisis rasio ini, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah cukup efektif meskipun cenderung meningkat. Oleh sebab itu, usaha peningkatan PAD perlu dilakukan guna mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam hal membiayai pengeluaran rutin daerah, dengan cara ekstensifikasi PAD, atau menggali sumber-sumber PAD baru.

Halim (2010: 128) Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Kemudian Mahsun (2006:187) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditargetkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PADefektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhri, 2016, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Hasil penelitian menunjukkan Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kaur berjalan Kurang Efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75% - 89%.

4.3.3 Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil

Temuan penelitian ini pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa kondisi Rasio Aktivitas Kabupaten Bolaang Mongondow dilihat dari Rasio Aktifitas pada Belanja Rutin berfluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 57,71% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 59,89%, dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 56,96%, sehingga rata-rata Rasio Aktifitas pada Belanja Rutin sebesar 58,19%. Sedangkan Rasio Aktivitas pada Belanja Pembangunan juga mengalami hal yang sama yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar

20.93% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 18.20%. Rata-rata Rasio Aktivitas pada Belanja Pembangunan adalah 19.22%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 3 tahun terakhir Rasio Aktivitas Kabupaten Bolaang Mongondow diprioritaskan untuk Belanja Rutin yang artinya presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Halim (2010: 128) Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Kemudian Mahsun (2006:187). Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin, berarti prosentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Zuhri, 2016, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Hasil penelitian menunjukkan Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik, sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% pertahun).

Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten

Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Rasio Keserasiandiketahui bahwarata-ratabelanjaoperasidaerahmasihsangattinggiyaitu 84,55% dibandingkandenganrata-ratabelanjamodalsebesar12,99% sehinggadapat dikatakanPemerintahDaerahmasihkurangmemperhatikanpembangunan daerah.

4.3.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Hasil penelitian ini pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa Rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondowpada tahun anggaran 2016-2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 45,06% dan pada tahun anggaran 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 81,49% menjadi -36,43%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan PAD. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin pada tahun anggaran 2017-2018sebesar 2,18% dan tahun anggaran 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 2,93% menjadi 56,96%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal pada tahun anggaran 2016-2017 sebesar 20.93% dan mengalami penurunan di tahun anggaran 2017-2018 menjadi 18.20% karena disebabkan oleh adanya penurunan belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari perhitungan rasio-rasio keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondowdiatas, maka dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondowsudah baik.

Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan Halim (2010: 128). Rasio yang mengukur sebesar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya Mahsun (2006:187).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Zuhri, 2016, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu ;

1. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dan berada pada kategori rendah sekali, sehingga kinerja keuangan pemerintah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow belum mandiri karena pendapatan daerah masih dominan dana transfer pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dalam pembiayaan pemerintahan.
2. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tergolong pada kriteria sangat efektif.
3. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan sudah secara optimal.
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow tergolong mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya

5. 2.Saran

Berdasarkan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka peneliti dapat memberikan saran :

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih rendah sehingga kepada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara memaksimal sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada (intensifikasi) serta meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru dengan cara ekstensifikasi.
2. Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan pemungutan Pajak, Retribusi, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang sah, serta pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat menambah anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun dengan memperhitungkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara cermat dan teliti untuk meningkatkan target penerimaan demi ketepatan anggaran.
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan dapat mempergunakan keuangan daerah tepat sasaran dengan cara membangun fasilitas-fasilitas di segala bidang khususnya bidang ekonomi yang mengakibatkan sektor-sektor usaha masyarakat dibidang ekonomi dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan dan hasilnya dapat digunakan membayar pajak, retribusi, menabung di bank pemerintah serta dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah

dalam setiap kegiatan sehingga pemerintah daerah dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Erlangga, Surabaya
- Bahtiar, Arif. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit PT. Salemba Empat Jakarta
- Bambang Riyanto, 2006, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Gadjah Mada, Yogyakarta
- Darise, Nurlan 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit PT. Indeks
- Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Erlangga, Surabaya
- HonyAdhiantoko, 2016. Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora
- Halim, 2015, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Penerbit Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Kasmir, 2010. Analisis Laporan Keuangan, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro Mohammad, (2008) “ Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah” . Jakarta. Balai Pustaka.
- Mardiasmo, 2005. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Provinsi. Andi. Jogjakarta.
-----, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi Publisher, Jakarta
- Mahmudi, 2016, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- MuhammadZuhri, 2016. Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur
- Mulyadi. 2004. Balance Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan .Salemba Empat. Jakarta
- Mutiha, 2016. Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor

Munawir. 2007. Analisis Laporan Keuangan. Liberty. Jogjakarta

Nordiawan, dkk, 2006. Akuntansi sektor publik, Jakarta, Salemba empat.

SandyCandra,2018. Skripsi Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembran tahun

Sedarmayanti, 2002, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Umum, Cetakan kedua, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Warsono, 2002. Analisa Laporan Keuangan Edisi tiga, Penerbit BPFE, Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015					
URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.021.677.435.168,00	925.585.663.950,00	90,59	809.358.151.745,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA		46.408.712.500,00	47.338.649.102,00	102,00	41.983.855.197,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		9.316.015.000,00	11.438.591.661,00	122,78	6.883.723.429,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		23.890.708.000,00	20.654.861.453,00	86,46	17.824.990.051,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		2.500.000.000,00	1.366.238.409,00	54,65	2.395.775.305,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		10.701.989.500,00	13.878.957.579,00	129,69	14.879.366.412,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA		942.101.906.668,00	875.041.614.848,00	92,88	753.941.287.548,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		802.717.078.000,00	727.498.595.220,00	90,63	615.444.607.234,00
Bagi Hasil Pajak - LRA		6.774.807.000,00	10.830.777.447,00	159,87	5.024.461.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		18.406.330.000,00	16.917.015.344,00	91,91	8.177.998.234,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		560.387.198.000,00	560.387.198.000,00	100,00	509.338.818.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		217.148.743.000,00	139.363.604.429,00	64,18	92.903.330.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		119.867.236.000,00	119.867.236.000,00	100,00	127.209.938.000,00
Dana Penyesuaian - LRA		0,00	0,00	0,00	73.751.507.000,00
Dana Desa - LRA		119.867.236.000,00	119.867.236.000,00	100,00	53.458.431.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		18.017.592.668,00	26.175.783.628,00	145,28	11.286.742.314,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		12.043.101.883,00	15.930.227.456,00	132,28	8.522.443.653,00
Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA		5.974.490.785,00	10.245.556.172,00	171,49	2.764.298.661,00
Bantuan Keuangan - LRA		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA		33.166.816.000,00	3.205.400.000,00	9,66	13.433.009.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		33.166.816.000,00	2.000.000.000,00	6,03	1.000.000.000,00
Dana Darurat - LRA		0,00	0,00	0,00	12.418.894.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	1.205.400.000,00	0,00	14.115.000,00
BELANJA	5.1.2	884.099.530.406,93	791.845.068.452,00	89,57	748.045.354.586,80
BELANJA OPERASI		656.117.371.874,93	613.066.539.117,00	93,44	568.336.319.910,00
Belanja Pegawai		402.827.237.651,33	378.296.478.440,00	93,91	357.186.184.159,00
Belanja Barang dan Jasa		219.708.850.643,60	202.023.220.677,00	91,95	210.434.135.751,00
Belanja Hibah		33.031.283.580,00	32.401.340.000,00	98,09	470.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial		550.000.000,00	345.500.000,00	62,82	246.000.000,00
BELANJA MODAL		227.482.158.532,00	178.437.529.335,00	78,44	178.595.387.076,80
Belanja Modal Tanah		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	390.990.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		48.144.494.013,00	45.990.214.857,00	95,53	27.758.045.806,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		29.526.414.413,00	24.707.733.825,00	83,68	41.606.991.833,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		149.241.250.106,00	107.372.115.653,00	71,95	101.683.416.395,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		470.000.000,00	267.465.000,00	56,91	7.155.943.042,00
BELANJA TAK TERDUGA		500.000.000,00	341.000.000,00	68,20	1.113.647.600,00
Belanja Tak Terduga		500.000.000,00	341.000.000,00	68,20	1.113.647.600,00
TRANSFER		161.944.361.653,00	161.348.800.256,00	99,63	75.923.302.744,60
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		161.944.361.653,00	161.348.800.256,00	99,63	75.923.302.744,60
Transfer Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	75.923.302.744,60
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		160.867.361.653,00	160.802.068.791,00	99,96	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.077.000.000,00	546.731.465,00	50,76	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(24.366.456.891,93)	(27.608.204.758,00)	113,30	(14.610.505.586,40)
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	58.278.829.291,93	57.129.876.496,73	98,03	76.864.052.632,33
Penggunaan SiLPA		58.278.829.291,93	57.129.876.496,73	98,03	76.864.052.632,33

URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	33.912.372.400,00	1.745.516.400,00	5,15	3.984.289.027,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		32.166.816.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1.745.556.400,00	1.745.516.400,00	100,00	2.984.289.027,00
PEMBIAYAAN NETTO		24.366.456.891,93	55.384.360.096,73	227,30	72.879.763.605,33
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	0,00	27.776.155.338,73	0,00	58.269.258.018,93

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, 2016

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

ADRIANUS NIXON WATUNG, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO	URAIAN	REF	SALDO 2016	SALDO 2015	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		12.028.988.507,00	8.180.244.177,00	3.848.744.330,00	47,05
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		20.587.074.034,00	17.689.980.817,00	2.897.093.217,00	16,38
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		1.366.238.409,00	2.395.775.305,00	(1.029.536.896,00)	(42,97)
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO		29.212.285.579,00	14.618.716.112,00	14.593.569.467,00	99,83
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.194.586.529,00	42.884.716.411,00	20.309.870.118,00	47,36
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		727.498.595.220,00	615.444.607.234,00	112.053.987.986,00	18,21
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		119.867.236.000,00	127.209.938.000,00	(7.342.702.000,00)	(5,77)
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		22.090.859.965,00	20.538.621.797,00	1.552.238.168,00	7,56
13	Bantuan Keuangan - LO		1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer		870.956.691.185,00	763.193.167.031,00	107.763.524.154,00	0,00
15						
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
17	Pendapatan Hibah - LO		33.166.814.813,00	34.298.390.000,00	(1.131.575.187,00)	(3,30)
18	Dana Darurat - LO		0,00	12.418.894.000,00	(12.418.894.000,00)	(100,00)
19	Pendapatan Lainnya - LO		28.867.950.000,00	0,00	28.867.950.000,00	0,00
20	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		62.034.764.813,00	46.717.284.000,00	15.317.480.813,00	32,79
21	JUMLAH PENDAPATAN		996.186.042.527,00	852.795.167.442,00	143.390.875.085,00	16,81
22						
23	BEBAN	5.4.2				
24	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
25	Beban Pegawai - LO		383.057.393.385,00	362.180.942.659,00	20.876.450.726,00	5,76
26	Beban Barang dan Jasa		231.002.620.859,00	231.244.102.123,00	(241.481.264,00)	(0,10)
27	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Hibah		32.401.340.000,00	470.000.000,00	31.931.340.000,00	6.793,90
30	Beban Bantuan Sosial		345.500.000,00	246.000.000,00	99.500.000,00	40,45
31	Beban Penyusutan dan Amortisasi		41.110.442.116,00	31.467.778.119,81	9.642.663.996,19	30,64
32	Beban Penyisihan Piutang		1.940.302.512,10	1.363.617.584,02	576.684.928,08	42,29
33	Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
37	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
38	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
40	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	80.890.670.901,60	(80.890.670.901,60)	(100,00)
41	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		160.802.068.791,00	0,00	160.802.068.791,00	0,00
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		546.731.465,00	0,00	546.731.465,00	0,00
43	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
44	JUMLAH BEBAN		851.206.399.128,10	707.863.111.387,43	143.343.287.740,67	20,25
45	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	144.979.643.398,90	144.932.056.054,57	47.587.344,33	0,03
46						
47	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
48	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		144.979.643.398,90	144.932.056.054,57	47.587.344,33	0,03
55	POS LUAR BIASA	5.4.5				
56	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Beban Luar Biasa		341.000.000,00	1.113.647.600,00	(772.647.600,00)	(69,38)
58	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(341.000.000,00)	(1.113.647.600,00)	772.647.600,00	(69,38)
59	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	144.638.643.398,90	143.818.408.454,57	820.234.944,33	0,57

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK,

2016

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

ADRIANUS NIXON WATUNG, SH

 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW LAPORAN ARUS KAS Per 31 December 2016 dan 2015			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		11.438.591.661,00	6.883.723.429,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		20.654.861.453,00	17.824.990.051,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		1.366.238.409,00	2.395.775.305,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		13.878.957.579,00	14.039.841.412,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		727.498.595.220,00	615.444.607.234,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		119.867.236.000,00	127.209.938.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		26.175.783.628,00	11.286.742.314,00
Bantuan Keuangan - LRA		1.500.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA		2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Dana Darurat - LRA		0,00	12.418.894.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA		1.205.400.000,00	14.115.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		925.585.663.950,00	808.518.626.745,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		378.296.478.440,00	357.186.184.159,00
Belanja Barang dan Jasa		202.023.220.677,00	210.434.135.751,00
Belanja Hibah		32.401.340.000,00	470.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial		345.500.000,00	246.000.000,00
Belanja Tak Terduga		341.000.000,00	1.113.647.600,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	75.923.302.744,60
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		160.802.068.791,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		546.731.465,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		774.756.339.373,00	645.373.270.254,60
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	150.829.324.577,00	163.145.356.490,40
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		0,00	839.525.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	839.525.000,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Modal Tanah		100.000.000,00	390.990.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		45.990.214.857,00	27.758.045.806,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		24.707.733.825,00	41.606.991.833,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		107.372.115.653,00	101.683.416.395,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		267.465.000,00	7.155.943.042,00
Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	1.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		178.437.529.335,00	179.595.387.076,80
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(178.437.529.335,00)	(178.755.862.076,80)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		1.745.516.400,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota		0,00	2.984.289.027,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.745.516.400,00	2.984.289.027,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	(1.745.516.400,00)	(2.984.289.027,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		58.533.900.770,00	61.983.595.698,60
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4	58.533.900.770,00	61.983.595.698,60
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		56.824.441.110,00	62.138.302.284,00
Koreksi SILPA		1.148.952.795,20	9.571.273,00
Jumlah Arus Kas Keluar		57.973.393.905,20	62.147.873.557,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		560.506.864,80	(164.277.858,40)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(28.793.214.293,20)	(18.759.072.471,80)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		58.308.103.935,20	77.067.176.407,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		29.514.889.642,00	58.308.103.935,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Kas di bendahara JKN		612.092.096,00	921.181.030,00
Kas di Bendahara BOS		9.461.036.953,00	0,00
Saldo Akhir Kas		39.588.018.691,00	59.229.284.965,00

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, 2016

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

ADRIANUS NIXON WATUNG, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.048.391.293.294,50	1.039.637.390.874,48	99,17	925.585.663.950,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA		69.884.540.030,50	68.669.558.555,78	98,26	47.338.649.102,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		10.079.856.445,00	10.181.097.484,00	101,00	11.438.591.661,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		10.183.000.000,00	8.269.673.292,00	81,21	20.654.861.453,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		1.802.356.676,00	1.802.356.676,00	100,00	1.366.238.409,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		47.819.326.909,50	48.416.431.103,78	101,25	13.878.957.579,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA		978.506.753.264,00	970.453.037.658,00	99,18	875.041.614.848,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		754.431.435.000,00	744.283.785.183,00	98,65	727.498.595.220,00
Bagi Hasil Pajak - LRA		7.346.357.000,00	7.536.153.509,00	102,58	10.830.777.447,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		6.106.071.000,00	8.492.820.360,00	139,09	16.917.015.344,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		555.027.490.000,00	555.027.490.000,00	100,00	560.387.198.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		185.951.517.000,00	173.227.321.314,00	93,16	139.363.604.429,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		195.922.456.000,00	195.922.420.442,00	100,00	119.867.236.000,00
Dana Penyesuaian - LRA		43.364.901.000,00	43.364.901.000,00	0,00	0,00
Dana Desa - LRA		152.557.555.000,00	152.557.519.442,00	100,00	119.867.236.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		26.252.862.264,00	28.346.832.033,00	107,98	26.175.783.628,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		16.067.243.498,00	16.993.864.309,00	105,77	15.930.227.456,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA		10.185.618.766,00	11.352.967.724,00	111,46	10.245.556.172,00
Bantuan Keuangan - LRA		1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA		0,00	514.794.660,70	0,00	3.205.400.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Dana Darurat - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	514.794.660,70	0,00	1.205.400.000,00
BELANJA	5.1.2	862.374.006.843,23	818.573.903.498,00	94,92	791.845.068.452,00
BELANJA OPERASI		633.700.395.356,44	600.025.766.967,00	94,69	613.066.539.117,00
Belanja Pegawai		375.871.452.974,98	364.656.354.867,00	97,02	378.296.478.440,00
Belanja Barang dan Jasa		240.502.651.445,46	218.403.121.164,00	90,81	202.023.220.677,00
Belanja Hibah		17.276.290.936,00	16.916.290.936,00	97,92	32.401.340.000,00
Belanja Bantuan Sosial		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	345.500.000,00
BELANJA MODAL		227.673.611.486,79	217.643.499.309,00	95,59	178.437.529.335,00
Belanja Modal Tanah		1.500.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		41.741.785.472,00	35.495.601.427,00	85,04	45.990.214.857,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		27.729.119.919,00	26.201.574.683,00	94,49	24.707.733.825,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		152.451.177.800,79	150.985.258.745,00	99,04	107.372.115.653,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.750.028.295,00	4.961.064.454,00	86,28	267.465.000,00
BELANJA TAK TERDUGA		1.000.000.000,00	904.637.222,00	90,46	341.000.000,00
Belanja Tak Terduga		1.000.000.000,00	904.637.222,00	90,46	341.000.000,00
TRANSFER		213.793.441.788,00	212.790.715.823,00	99,53	161.348.800.256,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		213.793.441.788,00	212.790.715.823,00	99,53	161.348.800.256,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		211.793.441.788,00	211.736.661.088,00	99,97	160.802.068.791,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.000.000.000,00	54.054.735,00	5,41	546.731.465,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(27.776.155.336,73)	8.272.771.553,48	(29,78)	(27.608.204.758,00)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	27.776.155.336,73	27.428.214.367,73	98,75	57.129.876.496,73
Penggunaan SILPA		27.776.155.336,73	27.428.214.367,73	98,75	57.129.876.496,73
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	1.745.516.400,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	1.745.516.400,00
PEMBIAYAAN NETTO		27.776.155.336,73	27.428.214.367,73	98,75	55.384.360.096,73
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	0,00	35.700.985.921,21	0,00	27.776.155.338,73

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, MARET 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



Dra. Hj. YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	REF	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO		10.410.446.876,00	12.028.988.507,00	(1.618.541.631,00)	(13,46)
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		8.416.472.028,00	20.587.074.034,00	(12.170.602.006,00)	(59,12)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		1.802.356.676,00	1.366.238.409,00	436.118.267,00	31,92
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO		48.234.976.308,78	29.212.285.579,00	19.022.690.729,78	65,12
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.864.251.888,78	63.194.586.529,00	5.669.665.359,78	8,97
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		744.283.785.183,00	727.498.595.220,00	16.785.189.963,00	2,31
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		195.922.420.442,00	119.867.236.000,00	76.055.184.442,00	63,45
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		23.333.079.081,00	22.090.859.965,00	1.242.219.116,00	5,62
13	Bantuan Keuangan - LO		1.900.000.000,00	1.500.000.000,00	400.000.000,00	26,67
14	Jumlah Pendapatan Transfer		965.439.284.706,00	870.956.691.185,00	94.482.593.521,00	10,85
15						
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
17	Pendapatan Hibah - LO		542.000.000,00	33.166.814.813,00	(32.624.814.813,00)	(98,37)
18	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pendapatan Lainnya - LO		514.794.660,70	28.867.950.000,00	(28.353.155.339,30)	(98,22)
20	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1.056.794.660,70	62.034.764.813,00	(60.977.970.152,30)	(98,30)
21	JUMLAH PENDAPATAN		1.035.360.331.255,48	996.186.042.527,00	39.174.288.728,48	3,93
22						
23	BEBAN	5.4.2				
24	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
25	Beban Pegawai - LO		364.656.354.867,00	383.057.393.385,00	(18.401.038.518,00)	(4,80)
26	Beban Persediaan		1.421.320.004,00	30.646.939.563,00	(29.225.619.559,00)	(30,10)
27	Beban Jasa		139.109.451.448,00	141.358.070.018,00	(2.248.618.570,00)	(1,59)
28	Beban Perjalanan Dinas		56.444.814.053,00	58.088.213.978,00	(1.643.399.925,00)	(2,83)
29	Beban Pemeliharaan		1.557.935.751,00	909.397.300,00	648.538.451,00	71,32
30	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Hibah		16.916.290.936,00	32.401.340.000,00	(15.485.049.064,00)	(47,79)
33	Beban Bantuan Sosial		50.000.000,00	345.500.000,00	(295.500.000,00)	28,80
34	Beban Penyusutan dan Amortisasi		31.130.319.391,00	41.110.442.116,00	(9.980.122.725,00)	23,46
35	Beban Penyisihan Piutang		481.701.536,59	1.940.302.512,10	(1.458.600.975,51)	(75,17)
36	Beban Lain-lain		15.630.878.618,21	0,00	15.630.878.618,21	0,00
37	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
38	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
40	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
41	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		211.736.661.088,00	160.802.068.791,00	50.934.592.297,00	0,00
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		54.054.735,00	546.731.465,00	(492.676.730,00)	0,00
43	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
44	JUMLAH BEBAN		860.189.782.427,80	851.206.399.128,10	8.983.383.299,70	3,79
45	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	175.170.548.827,68	144.979.643.398,90	30.190.905.428,78	20,82
46						
47	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
48	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		175.170.548.827,68	144.979.643.398,90	30.190.905.428,78	20,82
56	POS LUAR BIASA	5.4.5				
57	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Beban Luar Biasa		904.637.222,00	341.000.000,00	563.637.222,00	165,29
59	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(904.637.222,00)	(341.000.000,00)	(563.637.222,00)	165,29
60	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	174.265.911.605,68	144.638.643.398,90	29.627.268.206,78	20,48

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, MARET 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

231.002.620.859,00

218.533.521.256,00

231.002.620.859,00
0,00

212.790.715.823,00

 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW LAPORAN ARUS KAS Per 31 December 2017 dan 2016			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		10.181.097.484,00	11.438.591.661,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		8.269.673.292,00	20.654.861.453,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		1.802.356.676,00	1.366.238.409,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		9.278.804.855,78	13.878.957.579,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		744.283.785.183,00	727.498.595.220,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		195.922.420.442,00	119.867.236.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		28.346.832.033,00	26.175.783.628,00
Bantuan Keuangan - LRA		1.900.000.000,00	1.500.000.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		0,00	2.000.000.000,00
Dana Darurat - LRA		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA		514.794.660,70	1.205.400.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.000.499.764.626,48	925.585.663.950,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		364.656.354.867,00	378.296.478.440,00
Belanja Barang dan Jasa		187.277.448.626,00	202.023.220.677,00
Belanja Hibah		16.916.290.936,00	32.401.340.000,00
Belanja Bantuan Sosial		50.000.000,00	345.500.000,00
Belanja Tak Terduga		904.637.222,00	341.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1.000.000.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		211.736.661.088,00	160.802.068.791,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		54.054.735,00	546.731.465,00
Jumlah Arus Kas Keluar		782.595.447.474,00	774.756.339.373,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	217.904.317.152,48	150.829.324.577,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		0,00	100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		33.446.695.866,00	45.990.214.857,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		26.091.355.951,00	24.707.733.825,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		150.985.258.745,00	107.372.115.653,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.697.725.100,00	267.465.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		212.221.035.662,00	178.437.529.335,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(212.221.035.662,00)	(178.437.529.335,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	1.745.516.400,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	1.745.516.400,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	0,00	(1.745.516.400,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.191.108.406,09	58.533.900.770,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4	60.191.108.406,09	58.533.900.770,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		61.888.650.716,09	56.824.441.110,00
Koreksi SILPA		347.940.971,00	1.148.952.795,20
Jumlah Arus Kas Keluar		62.236.591.687,09	57.973.393.905,20
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(2.045.483.281,00)	560.506.864,80

URAIAN	REF	2017	2016
Kenaikan / (Penurunan) Kas		3.637.798.209,48	(28.793.214.293,20)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara JKN		29.514.889.642,00	58.308.103.935,20
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara JKN		614.046.602,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan		33.766.734.453,48	29.514.889.642,00
Kas di Bendahara JKN		112.872.217,00	612.092.096,00
Kas di Bendahara BOS		2.659.636.774,00	9.461.036.953,00
Saldo Akhir Kas		36.539.243.444,48	39.588.018.691,00

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, MARET 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.035.414.181.641,00	1.028.718.824.637,00	99,35	1.039.637.390.874,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	41.528.276.611,00	43.651.374.144,00	105,11	68.669.558.555,78
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	10.472.715.901,00	16.895.123.938,00	161,33	10.181.097.484,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	12.778.300.000,00	7.374.405.895,00	57,71	8.269.673.292,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	2.826.890.350,00	3.126.890.350,00	110,61	1.802.356.676,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	15.450.370.360,00	16.254.953.961,00	105,21	48.416.431.103,78
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	964.968.305.030,00	957.799.350.570,00	99,26	970.453.037.658,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	789.223.579.974,00	780.710.643.852,00	98,92	744.283.785.183,00
Bagi Hasil Pajak - LRA		11.258.627.000,00	9.121.476.266,00	81,02	7.536.153.509,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		6.491.096.000,00	7.290.927.168,00	112,32	8.492.820.360,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		556.612.417.000,00	556.612.417.000,00	100,00	555.027.490.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		214.861.439.974,00	207.685.823.418,00	96,66	173.227.321.314,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	141.107.482.000,00	141.107.482.000,00	100,00	195.922.420.442,00
Dana Penyesuaian - LRA		0,00	0,00	0,00	43.364.901.000,00
Dana Desa - LRA		141.107.482.000,00	141.107.482.000,00	100,00	152.557.519.442,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	33.637.243.056,00	35.014.579.718,00	104,09	28.346.832.033,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		22.893.344.180,00	25.178.952.634,00	109,98	16.993.864.309,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA		10.743.898.876,00	9.835.627.084,00	91,55	11.352.967.724,00
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.4	1.000.000.000,00	966.645.000,00	96,66	1.900.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		1.000.000.000,00	966.645.000,00	96,66	1.900.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	28.917.600.000,00	27.268.099.923,00	0,00	514.794.660,70
Pendapatan Hibah - LRA		28.917.600.000,00	27.268.099.923,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	514.794.660,70
BELANJA	5.1.2	868.045.071.562,21	803.577.631.019,00	92,57	818.573.903.498,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	665.359.426.994,21	616.104.263.944,00	92,60	600.025.766.967,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	387.510.105.628,21	369.832.161.996,00	95,44	364.656.354.867,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	272.565.121.366,00	241.105.071.948,00	88,46	218.403.121.164,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	5.284.200.000,00	5.167.030.000,00	97,78	16.916.290.936,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	201.685.644.568,00	187.256.653.075,00	92,85	217.643.499.309,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	2.981.207.384,00	2.878.963.753,00	96,57	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	40.693.169.863,00	34.598.463.147,00	85,02	35.495.601.427,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	51.943.946.841,00	44.504.921.765,00	85,68	26.201.574.683,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	96.300.845.590,00	95.993.693.410,00	99,68	150.985.258.745,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	9.766.474.890,00	9.280.611.000,00	95,03	4.961.064.454,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	1.000.000.000,00	216.714.000,00	21,67	904.637.222,00
Belanja Tak Terduga		1.000.000.000,00	216.714.000,00	21,67	904.637.222,00
TRANSFER	5.1.3	203.070.096.000,00	202.363.470.758,00	99,65	212.790.715.823,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	2.526.400.000,00	2.387.894.588,00	94,52	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.526.400.000,00	2.387.894.588,00	94,52	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	200.543.696.000,00	199.975.576.170,00	99,72	212.790.715.823,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	198.543.696.000,00	198.543.649.500,00	100,00	211.736.661.088,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.3	1.000.000.000,00	431.926.670,00	43,19	54.054.735,00
SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.4	(35.700.985.921,21)	22.777.722.860,00	(63,80)	8.272.771.553,48

URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
PEMBIAYAAN	5.1.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1	35.700.985.921,21	35.205.029.042,73	98,61	27.428.214.367,73
Penggunaan SiLPA		35.700.985.921,21	35.205.029.042,73	98,61	27.428.214.367,73
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.6	35.700.985.921,21	35.205.029.042,73	98,61	27.428.214.367,73
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.7	0,00	57.982.751.902,73	0,00	35.700.985.921,21

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, MEI 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW LAPORAN ARUS KAS Per 31 December 2018 dan 2017			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		16.895.123.938,00	10.181.097.484,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		7.374.405.895,00	8.269.673.292,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		2.826.890.350,00	1.802.356.676,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		7.851.325.957,00	9.278.804.855,78
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		780.710.643.852,00	744.283.785.183,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		141.107.482.000,00	195.922.420.442,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		35.014.579.718,00	28.346.832.033,00
Bantuan Keuangan - LRA		966.645.000,00	1.900.000.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		0,00	0,00
Dana Darurat - LRA		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	514.794.660,70
Jumlah Arus Kas Masuk		992.747.096.710,00	1.000.499.764.626,48
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		369.832.161.996,00	364.656.354.867,00
Belanja Barang dan Jasa		212.556.922.934,00	187.277.448.626,00
Belanja Hibah		5.167.030.000,00	16.916.290.936,00
Belanja Bantuan Sosial		-	50.000.000,00
Belanja Tak Terduga		216.714.000,00	904.637.222,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.387.894.588,00	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		198.543.649.500,00	211.736.661.088,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		431.926.670,00	54.054.735,00
Jumlah Arus Kas Keluar		790.136.299.688,00	782.595.447.474,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	202.610.797.022,00	217.904.317.152,48
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		1.618.520.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.618.520.000,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		2.878.963.753,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		32.186.904.507,00	33.446.695.866,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		44.504.344.265,00	26.091.355.951,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		95.992.993.410,00	150.985.258.745,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.833.417.850,00	1.697.725.100,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			
Jumlah Arus Kas Keluar		179.396.623.785,00	212.221.035.662,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(177.778.103.785,00)	(212.221.035.662,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		56.438.962.943,00	60.191.108.406,09
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4	56.438.962.943,00	60.191.108.406,09
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		56.443.524.382,00	61.888.650.716,09
Koreksi SiLPA		82.500.000,48	347.940.971,00
Jumlah Arus Kas Keluar		56.526.024.382,48	62.236.591.687,09
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(87.061.439,48)	(2.045.483.281,00)

URAIAN	REF	2018	2017
Kenaikan / (Penurunan) Kas		24.745.631.797,52	3.637.798.209,48
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan		33.766.734.453,48	29.514.889.642,00
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara JKN		-	614.046.602,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan		58.512.366.251,00	33.766.734.453,48
Kas di Bendahara JKN		180.401.736,00	112.872.217,00
Kas di Bendahara BOS		123.680.000,00	2.659.636.774,00
Saldo Akhir Kas		58.816.447.987,00	36.539.243.444,48

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, MEI 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	REF	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		16.828.617.531,00	10.410.446.876,00	6.418.170.655,00	61,65
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		7.430.403.812,00	8.416.472.028,00	(986.068.216,00)	(11,72)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		3.126.890.350,00	1.802.356.676,00	1.324.533.674,00	73,49
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO		16.154.272.320,00	48.234.976.308,78	(32.080.703.988,78)	(66,51)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.540.184.013,00	68.864.251.888,78	(25.324.067.875,78)	(36,77)
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		780.710.643.852,00	744.283.785.183,00	36.426.858.669,00	4,89
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		141.107.482.000,00	195.922.420.442,00	(54.814.938.442,00)	(27,98)
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		34.244.128.985,00	23.333.079.081,00	10.911.049.904,00	46,76
13	Bantuan Keuangan - LO		966.645.000,00	1.900.000.000,00	(933.355.000,00)	(49,12)
14	Jumlah Pendapatan Transfer		957.028.899.837,00	965.439.284.706,00	(8.410.384.869,00)	(0,87)
15						
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
17	Pendapatan Hibah - LO		28.572.346.373,00	542.000.000,00	28.030.346.373,00	5.171,65
18	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pendapatan Lainnya - LO		0,00	514.794.660,70	(514.794.660,70)	(100,00)
20	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		28.572.346.373,00	1.056.794.660,70	27.515.551.712,30	2.603,68
21	JUMLAH PENDAPATAN		1.029.141.430.223,00	1.035.360.331.255,48	(6.218.901.032,48)	(0,60)
22						
23	BEBAN	5.4.2				
24	BEBAN OPERASI	5.4.2.1	687.922.632.228,10	647.399.066.604,80	40.523.565.623,30	6,26
25	Beban Pegawai - LO		369.832.161.996,00	364.656.354.867,00	5.175.807.129,00	1,42
26	Beban Persediaan		27.376.087.647,00	21.421.320.004,00	5.954.767.643,00	27,80
27	Beban Jasa		151.794.501.012,00	139.109.451.448,00	12.685.049.564,00	9,12
28	Beban Pemeliharaan		779.797.100,00	1.557.935.751,00	(778.138.651,00)	(49,95)
29	Beban Perjalanan Dinas		68.257.853.138,00	56.444.814.053,00	11.813.039.085,00	20,93
30	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Hibah		5.167.030.000,00	16.916.290.936,00	(11.749.260.936,00)	(69,46)
33	Beban Bantuan Sosial		0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
34	Beban Penyusutan dan Amortisasi		63.374.607.417,67	31.130.319.391,00	32.244.288.026,67	103,58
35	Beban Penyisihan Piutang		1.340.593.917,43	481.701.536,59	858.892.380,84	178,30
36	Beban Lain-lain		0,00	15.630.878.618,21	(15.630.878.618,21)	(100,00)
37	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	202.363.470.758,00	212.790.715.823,00	(10.427.245.065,00)	(4,90)
38	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.387.894.588,00	0,00	2.387.894.588,00	0,00
39	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
40	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
41	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		198.543.649.500,00	211.736.661.088,00	(13.193.011.588,00)	(6,23)
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		431.926.670,00	54.054.735,00	377.871.935,00	699,05
43	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
44	JUMLAH BEBAN		890.286.102.986,10	860.189.782.427,80	30.096.320.558,30	3,50
45	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	138.855.327.236,90	175.170.548.827,68	(36.315.221.590,78)	(20,73)
46						
47	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
48	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		4.600.321.714,00	0,00	(4.600.321.714,00)	0,00
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(4.600.321.714,00)	0,00	(4.600.321.714,00)	0,00
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		134.255.005.522,90	175.170.548.827,68	(40.915.543.304,78)	(23,36)
56	POS LUAR BIASA	5.4.5	216.714.000,00	904.637.222,00	(687.923.222,00)	(76,04)
57	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Beban Luar Biasa		216.714.000,00	904.637.222,00	(687.923.222,00)	(76,04)
59	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(216.714.000,00)	(904.637.222,00)	687.923.222,00	(76,04)
60	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	134.038.291.522,90	174.265.911.605,68	(40.227.620.082,78)	(23,08)

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, MEI 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Dra. Hi. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018				
URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
PENDAPATAN - LRA	1.099.375.227.045,26	1.068.330.775.578,00	97,18	1.028.718.824.637,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	52.326.417.054,26	64.108.478.949,26	122,52	43.651.374.144,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	26.865.644.645,00	35.813.984.120,00	133,31	16.895.123.938,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.921.280.000,00	8.574.790.887,00	108,25	7.374.405.895,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	4.364.995.912,00	4.364.995.912,00	100,00	3.126.890.350,00
	13.174.496.497,26	15.354.708.030,26	116,55	16.254.953.961,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	996.848.700.391,00	957.571.533.628,74	96,06	957.799.350.570,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	804.129.536.320,00	763.468.582.412,00	94,94	780.710.643.852,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	9.556.386.000,00	6.282.405.600,00	65,74	9.121.476.266,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	16.802.760.300,00	11.836.777.197,00	70,45	7.290.927.168,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	571.745.598.000,00	571.375.460.000,00	99,94	556.612.417.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	206.024.792.020,00	173.973.939.615,00	84,44	207.685.823.418,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	160.098.474.000,00	160.098.473.200,00	100,00	141.107.482.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa - LRA	160.098.474.000,00	160.098.473.200,00	100,00	141.107.482.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	32.620.690.071,00	34.004.478.016,74	104,24	35.014.579.718,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	32.620.690.071,00	34.004.478.016,74	104,24	25.178.952.634,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	9.835.627.084,00
Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	966.645.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	966.645.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	50.200.109.600,00	46.650.763.000,00	92,93	27.268.099.923,00
Pendapatan Hibah - LRA	50.200.109.600,00	46.650.763.000,00	92,93	27.268.099.923,00
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	930.232.216.947,99	820.204.288.335,00	88,17	803.577.631.019,00
BELANJA OPERASI	680.584.017.447,99	608.531.439.640,00	89,41	616.104.263.944,00
Belanja Pegawai	405.008.599.277,99	382.505.024.616,00	94,44	369.832.161.996,00
Belanja Barang dan Jasa	269.008.335.670,00	220.025.265.524,00	81,79	241.105.071.948,00
Belanja Hibah	6.130.682.500,00	5.695.949.500,00	92,91	5.167.030.000,00
Belanja Bantuan Sosial	436.400.000,00	305.200.000,00	69,94	0,00
BELANJA MODAL	248.148.199.500,00	210.755.250.695,00	84,93	187.256.653.075,00
Belanja Modal Tanah	285.000.000,00	259.835.500,00	91,17	2.878.963.753,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.460.728.474,00	71.208.500.773,00	82,36	34.598.463.147,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.254.880.767,00	39.455.939.549,00	76,98	44.504.921.765,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.024.733.475,00	94.398.819.818,00	90,75	95.993.693.410,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.122.856.784,00	5.432.155.055,00	88,72	9.280.611.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	917.598.000,00	61,17	216.714.000,00
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	917.598.000,00	61,17	216.714.000,00
TRANSFER	224.875.762.000,00	224.686.826.367,00	99,92	202.363.470.758,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.466.813.000,00	3.465.908.400,00	99,97	2.387.894.588,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.466.813.000,00	3.465.908.400,00	99,97	2.387.894.588,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	221.408.949.000,00	221.220.917.967,00	99,92	199.975.576.170,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	219.908.949.000,00	219.908.931.400,00	100,00	198.543.649.500,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	500.000.000,00	311.986.567,00	62,40	431.926.670,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(55.732.751.902,73)	23.439.660.876,00	(42,06)	22.777.722.860,00

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57,982,751,902.73	53,620,575,337.00	92.48	35,205,029,042.73
Penggunaan SiLPA	57,982,751,902.73	53,620,575,337.00	92.48	35,205,029,042.73
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal/Investasi	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	0.00	0.00
Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	55,732,751,902.73	51,370,575,337.00	92.17	35,205,029,042.73
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	74,810,236,213.00	0.00	57,982,751,902.73

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, 8 MEI 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2019 dan 2018			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		35,813,984,120.00	16,895,123,938.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		8,574,790,887.00	7,374,405,895.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		4,364,995,912.00	2,826,890,350.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		15,354,708,030.26	7,851,325,957.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		763,468,582,412.00	780,710,643,852.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		160,098,473,200.00	141,107,482,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		34,004,478,016.74	35,014,579,718.00
Bantuan Keuangan - LRA		0.00	966,645,000.00
Pendapatan Hibah - LRA		46,650,763,000.00	0.00
Dana Darurat - LRA		0.00	0.00
Pendapatan Lainnya - LRA		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		1,068,330,775,578.00	992,747,096,710.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		382,505,024,616.00	369,832,161,996.00
Belanja Barang dan Jasa		220,025,265,524.00	212,556,922,934.00
Belanja Hibah		5,695,949,500.00	5,167,030,000.00
Belanja Bantuan Sosial		305,200,000.00	-
Belanja Tak Terduga		917,598,000.00	216,714,000.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		3,465,908,400.00	2,387,894,588.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		219,908,931,400.00	198,543,649,500.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		311,986,567.00	431,926,670.00
Jumlah Arus Kas Keluar		834,135,864,007.00	790,136,299,688.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	234,194,911,571.00	202,610,797,022.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		0.00	1,618,520,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk		0.00	1,618,520,000.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		259,835,500.00	2,878,963,753.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		71,208,500,773.00	32,186,904,507.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		39,455,939,549.00	44,504,344,265.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		94,398,819,818.00	95,992,993,410.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5,432,155,055.00	3,833,417,850.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		2,250,000,000.00	
Jumlah Arus Kas Keluar		213,005,250,695.00	179,396,623,785.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(213,005,250,695.00)	(177,778,103,785.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	0.00	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60,998,103,249.00	56,438,962,943.00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4	60,998,103,249.00	56,438,962,943.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		59,955,717,119.27	56,443,524,382.00
Koreksi SilLPA		4,396,389,892.73	82,500,000.48
Jumlah Arus Kas Keluar		64,352,107,012.00	56,526,024,382.48
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(3,354,003,763.00)	(87,061,439.48)

URAIAN	REF	2019	2018
Kenaikan / (Penurunan) Kas		17,835,657,113.00	24,745,631,797.52
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan		58,512,366,251.00	33,766,734,453.48
Penurunan kas BOS dan JKN		(10,788,980,575.00)	-
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan		65,559,042,789.00	58,512,366,251.00
Kas di Bendahara JKN		707,081,654.00	180,401,736.00
Kas di Bendahara BOS		10,420,193,984.00	123,680,000.00
Saldo Akhir Kas		76,686,318,427.00	58,816,447,987.00

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, 8 MEI 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



Dra. Hj. A. SITI SOEPREDJO MOKOAGOW



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	REF	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO		34,909,950,460.00	16,828,617,531.00	18,081,332,929.00	107.44
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		8,574,790,887.00	7,430,403,812.00	1,144,387,075.00	15.40
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		4,364,995,912.00	3,126,890,350.00	1,238,105,562.00	39.60
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO		15,226,873,030.26	16,154,272,320.00	(927,399,289.74)	(5.74)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63,076,610,289.26	43,540,184,013.00	19,536,426,276.26	44.87
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		763,468,582,412.00	780,710,643,852.00	(17,242,061,440.00)	(2.21)
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		160,098,473,200.00	141,107,482,000.00	18,990,991,200.00	13.46
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		32,569,848,517.74	34,244,128,985.00	(1,674,280,467.26)	(4.89)
13	Bantuan Keuangan - LO		0.00	966,645,000.00	(966,645,000.00)	(100.00)
14	Jumlah Pendapatan Transfer		956,136,904,129.74	957,028,899,837.00	(891,995,707.26)	(0.09)
15						
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
17	Pendapatan Hibah - LO		47,421,161,000.00	28,572,346,373.00	18,848,814,627.00	65.97
18	Dana Darurat - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
19	Pendapatan Lainnya - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
20	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		47,421,161,000.00	28,572,346,373.00	18,848,814,627.00	65.97
21	JUMLAH PENDAPATAN		1,066,634,675,419.00	1,029,141,430,223.00	37,493,245,196.00	3.64
22						
23	BEBAN	5.4.2				
24	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
25	Beban Pegawai - LO		630,521,113,771.22	687,922,632,228.10	(57,401,518,456.88)	(8.34)
26	Beban Persediaan		382,505,024,616.00	369,832,161,996.00	12,672,862,620.00	3.43
27	Beban Jasa		16,449,220,033.00	27,376,087,647.00	(10,926,867,614.00)	(39.91)
28	Beban Pemeliharaan		102,869,782,807.48	151,794,501,012.00	(48,924,738,204.52)	(32.23)
29	Beban Perjalanan Dinas		7,898,495,956.00	779,797,100.00	7,118,698,856.00	912.89
30	Beban Bunga		60,173,052,857.00	68,257,853,138.00	(8,084,800,281.00)	(11.84)
31	Beban Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
32	Beban Hibah		32,898,375,563.00	5,167,030,000.00	27,731,345,563.00	536.70
33	Beban Bantuan Sosial		305,200,000.00	0.00	305,200,000.00	0.00
34	Beban Penyusutan dan Amortisasi		27,418,308,546.00	63,374,607,417.67	(35,956,298,871.67)	(56.74)
35	Beban Penyisihan Piutang		3,673,392.74	1,340,593,917.43	(1,336,920,524.69)	(99.73)
36	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
37	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		224,686,826,367.00	202,363,470,758.00	22,323,355,609.00	11.03
38	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		3,465,908,400.00	2,387,894,588.00	1,078,013,812.00	0.00
39	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
40	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		219,908,931,400.00	198,543,649,500.00	21,365,281,900.00	10.76
41	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		311,986,567.00	431,926,670.00	(119,940,103.00)	(27.77)
42	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
43	JUMLAH BEBAN		855,207,940,138.22	890,286,102,986.10	(35,078,162,847.88)	(3.94)
44	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3				
45	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
46	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
47	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
48	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
49	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0.00	4,600,321,714.00	0.00	0.00
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
51	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
53	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		211,426,735,280.78	134,255,005,522.90	77,171,729,757.88	57.48
54						
55	POS LUAR BIASA	5.4.5				
56	Pendapatan Luar Biasa - LO		917,598,000.00	216,714,000.00	700,884,000.00	323.41
57	Beban Luar Biasa		0.00	0.00	0.00	0.00
58	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		917,598,000.00	216,714,000.00	700,884,000.00	323.41
59	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6				
			210,509,137,280.78	134,038,291,522.90	76,470,845,757.88	57.05

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LOLAK, 08 MEI 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOGOW



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	REF	Dalam Ru jah	
			2019	2018
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	53.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1		58,380,405,493.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	65,437,677,942.00	131,960,758.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		91,183,313.00	0.00
6	Kas di Bendahara JKN	5.3.1.1.3	30,181,534.00	180,401,736.00
7	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.4	707,081,654.00	
8	Investasi Jangka Pendek		10,420,193,984.00	123,680,000.00
9	Piutang Pendapatan	53.1.1.5	0.00	0.00
10	Penyisihan Piutang Pendapatan		1,794,210,346.00	2,627,921,515.00
11	Piutang Pajak Netto		(439,909,580.95)	(957,568,895.97)
12	Piutang Retribusi		1,354,300,765.05	1,670,352,619.03
13	Penyisihan Piutang Retribusi		0.00	0.00
14	Piutang Retribusi Netto		0.00	0.00
15	Piutang Transfer	5.3.1.1.5	0.00	0.00
16	Penyisihan Piutang Transfer		7,542,578,741.00	6,807,900,191.00
17	Piutang Transfer Netto		(37,712,893.70)	(34,039,500.96)
18	Piutang Lainnya	5.3.1.1.6	7,504,865,847.30	6,773,860,690.04
19	Penyisihan Piutang Lainnya		82,500,000.00	1,043,350,521.00
20	Piutang lainnya netto		(375,000.00)	(348,985,320.50)
21	Beban di bayar dimuka	5.3.1.1.7	82,125,000.00	694,365,000.50
22	Persediaan	53.1.1.8	194,687,370.52	83,499,990.00
23	Jumlah Aset Lancar		10,715,049,182.00	3,523,760,146.00
24			7,591.87	
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
26	Investasi Nonpermanen		0.00	0.00
27	Pinjaman jangka panjang		0.00	0.00
28	Investasi dalam surat utang negara		0.00	0.00
29	Investasi dalam proyek pembangunan		0.00	0.00
30	Investasi non permanen lainnya		0.00	0.00
31	Jumlah Investasi nonpermanen		0.00	0.00
32				
33	Investasi permanen pemerintah daerah	5.3.1.2.1		
34	Investasi Permanen lainnya			
35	Jumlah Investasi Permanen		32,149,464,351.00	30,831,140,379.85
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang		0.00	0.00
37				
38	ASET TETAP	5.3.1.3		
39	Tanah		62,379,947,464.75	55,227,100,104.75
40	Peralatan dan Mesin		260,817,113,746.56	266,767,161,446.73
41	Gedung dan Bangunan		321,463,809,204.37	441,137,674,481.38
42	Jalan, Irigasi dan Jaringan		800,877,412,777.16	841,429,009,519.61
43	Aset tetap lainnya		58,649,782,185.00	57,768,818,209.00
44	Konstruksi dalam Pengerjaan		8,914,922,454.00	25,022,909,432.00
45	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.4	(308,475,467,556.54)	327,230,163,202.84
46	Jumlah Aset Tetap			
47				
48	DANA CADANGAN			
49	Dana Cadangan			
50	Jumlah Dana Cadangan		0.00	0.00
51				
52	ASET LAINNYA	5.3.1.5	0.00	0.00
53	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1		
54	Kemitraan dengan pihak ketiga	5.3.1.5.2		
55	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3		0.00
56	Aset lain-lain			0.00
57				640,373,800.00
58			833,015,521.00	95,917,490,470.56
59			0.00	
60			670,219,040.00	
61	Jumlah Aset lainnya		246,014,924,824.92	

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	URAIAN	REF	2019	2018
58				
59	JUMLAH ASET			
60				
61	KEWAJIBAN	5.3.2		
62				
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1,876,082,214.00	1,405,844,336.00
65	Utang Bunga		0.00	0.00
66	Bagian lancar utang jangka panjang		0.00	0.00
67	Pendapatan diterima dimuka		0.00	0.00
68	Utang Beban		0.00	0.00
69	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.2	3 372 115 772.00	5 220 481 560.00
70	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
71	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
72	Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
73	Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00
75	JUMLAH KEWAJIBAN			
76				
77	JUMLAH EKUITAS	5.3.3		
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
79				

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3245/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Bagus Ardi Destiyawan
NIM : E1117134
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : BADAN KEUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 25 Februari 2021

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0505/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : BAGUS ARDI DESTYAWAN
NIM : E1117134
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten bolaang mongondow

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



BAGUS ARDI DESTYAWAN.docx
Feb 26, 2021
5010 words / 35476 characters

E1117134 Bagus Ardi Destyawan

4. Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow

Sources Overview

34%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Similarity
1	eprints.ung.ac.id INTERNET	20%
2	id.scribd.com INTERNET	3%
3	directory.umm.ac.id INTERNET	2%
4	id.123dok.com INTERNET	1%
5	media.neliti.com INTERNET	1%
6	Sogang University on 2019-11-27 SUBMITTED WORKS	1%
7	www.scribd.com INTERNET	<1%
8	yhan-abdurrahim.blogspot.com INTERNET	<1%
9	dokumen.tips INTERNET	<1%
10	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
11	Politeknik Negeri Bandung on 2017-08-01 SUBMITTED WORKS	<1%
12	pt.scribd.com INTERNET	<1%
13	adoc.pub INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None

1. Identitas Pribadi



Nama : Bagus Ardi Destyawan
 NIM : E1117134
 Tempat/Tgl Lahir : Kotamobagu, 06 Desember 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Angkatan : 2017
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Akuntansi
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Pande Bulan, Kompleks Puskesmas Gogagoman Lama, RT 14, RW 006, Lingkungan III, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan Belajar di SD Negeri 1 Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu pada Tahun 2008.
2. Kemudian Menjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 1 Kotamobagu, Kota Kotamobagu pada Tahun 2011.
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA Islam Kotamobagu, Kota Kotamobagu pada Tahun 2014.
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, Mengambil Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi.

b. Pendidikan Non Formal

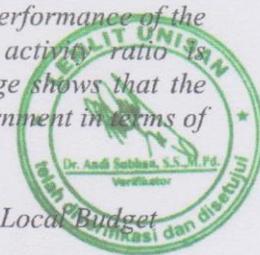
1. Peserta Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) yang di selenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian Profesi (KKLP) di Badan Keuangan Kota Gorontalo pada Tahun 2020.

ABSTRACT

BAGUS ARDI DESTYAWAN. E1117134. FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF BOLAANG MONGONDOW

This study aims to find out the financial performance of the government of Bolaang Mongondow Regency. The object of this research is the financial performance of the local government. This study uses quantitative methods through using ratio analysis. The population of this research is the realization of the Local Budget. The sample is the report on the Local Budget realization of the Bolaang Mongondow Regency from 2017 through 2019. The results of the study show that the independence ratio for three years on average is 6.11%, which means that the financial performance of the Bolaang Mongondow Regency Government in terms of the independence ratio has not been independent yet. The effectiveness ratio for three years on average shows 108.63%, which means that the financial performance of the Bolaang Mongondow Regency Government in terms of the effectiveness ratio has been effective. The activity ratio for three years on average shows that the financial performance of the Bolaang Mongondow Regency Government in terms of the activity ratio is categorized as good. The growth ratio for three years on average shows that the financial performance of the Bolaang Mongondow Regency Government in terms of growth ratio is good.

Keywords: financial performance, Local-Owned Source Revenue, Local Budget



ABSTRAK

BAGUS ARDI DESTYAWAN. E1117134. ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio. Populasi penelitian ini adalah Realisasi APBD. Kemudian sampelnya laporan realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Rasio Kemandirian selama tiga tahun rata-rata menunjukkan 6,11%, artinya bahwa kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari rasio kemandirian belum mandiri. Rasio Efektivitas selama tiga tahun rata-rata menunjukkan 108,63%, artinya bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari rasio efektivitas sudah efektif. Rasio Aktivitas selama tiga tahun rata-rata menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari rasio aktivitas dikategorikan sudah baik. Rasio Pertumbuhan selama tiga tahun rata-rata menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditinjau dari rasio pertumbuhan baik.

Kata kunci: kinerja keuangan, PAD, APBD





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat Kantor : Jl. Raya Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara <http://www.bolmongkab.go.id> \ e-mail : bkd@bolmongkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 000/B-02/BKD/127/11/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rio A. Lombone, S.STP., M.H

NIP : 19800703 199810 1 002

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IV/c

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow

Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama : Bagus Ardi Destiyawan

NIM : E1117134

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk keperluan.

Lolak, 18 Maret 2021

Kepala Badan Keuangan Daerah



RIO A. LOMBONE, S.STP., M.H

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19800703 199810 1 002

Tembusan :

Arsip